

PERANAN SEKTOR PERTANIAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Indra Hartini¹, Iskandar Malian², Emila Sholiha³

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Serelo Lahat^{1,2,3}

indrahartini164@gmail.com¹, Iskandar1996@gmail.com², Emilasholiha1@gmail.com³

ABSTRAK

Tujuan penelitian agar memudahkan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan wilayah kecamatan di Kabupaten Lahat sehingga akan mampu mempertahankan dan meningkatkan peranan sektor pertanian dalam perekonomian wilayah. Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Secara kualitatif adalah merupakan penjelasan atau uraian-uraian verbal. Sedangkan kuantitatif adalah pembahasan secara deskriptif dengan menggunakan rumus rasio keuangan. Hasil perhitungan rata-rata total pendapatan yang di peroleh petani padi sawah per periode produksi (4 bulan) Rp.2.974.062,13 per hektar, maka besar pendapatan petani padi sawah setiap bulannya adalah sebesar Rp.743.515,53. Hasil perhitungan rentabilitas ekonomi atau return assest (ROA) adalah rata-rata sebesar 75,80% untuk tiap hektarnya sekali panen. Simpulan pada penelitian ini adalah, a) tingkat pendapatan petani padi di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat belum layak berdasarkan upah minimum (UMR) di Kabupaten Lahat. Dengan demikian hipotesis yang di ajukan dapat di terima; b) kemampuan petani padi sawah Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat untuk mendapatkan keuntungan usaha tani melalui semua kemampuan dan sumber yang ada, menunjukan keadaan yang sangat baik sehingga hasil usaha tani yang dihasilkan dapat layak sesuai dengan keinginan para petani.

Kata Kunci: Sektor Pertanian dalam Perencanaan Pembangunan

ABSTRACT

The aim of the research is to facilitate local governments in planning and making development policies for sub-districts in Lahat Regency so that they will be able to maintain and increase the role of the agricultural sector in the regional economy. This research method is descriptive quantitative. Qualitatively, it is an explanation or verbal descriptions. While quantitative is a descriptive discussion using the formula of financial ratios. The results of calculating the average total income earned by lowland rice farmers per production period (4 months) is IDR 2,974,062.13 per hectare, so the amount of income for lowland rice farmers each month is IDR 743,515.53. The results of calculating economic profitability or return assest (ROA) is an average of 75.80% for each hectare once harvested. The conclusions in this study are, a) the income level of rice farmers in Kota Agung District, Lahat Regency is not feasible based on the minimum wage (UMR) in Lahat Regency. Thus the hypothesis proposed can be accepted; b) the ability of paddy rice farmers in Kota Agung District, Lahat Regency to benefit from farming through all available capabilities and resources, shows a very good condition so that the resulting farming results can be appropriate according to the wishes of the farmers.

Keywords: Agricultural Sector in Development Planning

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi dalam wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah ini mempunyai peran penting di dalam keberhasilan pembangunan di tingkat nasional karena keberhasilan pembangunan di tingkat daerah akan turut menentukan keberhasilan pembangunan di tingkat nasional.

Kabupaten Lahat sebagai daerah otonom, pemerintahannya dituntut untuk dapat mengenali sumber daya dan kondisi wilayahnya sehingga dapat mengoptimalkan kekayaan alam dalam sektor pertanian yang dimiliki untuk mendukung perekonomian daerah dan nasional. Keberadaan potensi pertanian yang dimiliki di Kabupaten Lahat tidak terlepas dari potensi di tingkat wilayah yang lingkungannya lebih kecil atau dalam hal ini adalah wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat.

Kecamatan merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota, yang terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Keberadaan wilayah suatu kabupaten pada hakekatnya tersusun dari wilayah kecamatan-kecamatan. Oleh karena itu, yang menjadi sentra perencanaan pembangunan adalah kecamatan, dengan mewujudkan perencanaan pembangunan yang utuh sehingga perencanaan di tingkat kabupaten dapat dilaksanakan secara keseluruhan.

Pembangunan wilayah kecamatan di Kabupaten Lahat perlu dilaksanakan guna mencapai pertumbuhan wilayah dan keseimbangan antar wilayah dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada mulai dari sumber daya alam, manusia maupun budaya di wilayah tersebut, dan pembangunan wilayah merupakan desentralisasi fungsi dimana terdapat pendistribusian kegiatan. Seiring dengan bergulirnya otonomi daerah, masing-masing kecamatan di Kabupaten Lahat mempunyai suatu kesempatan yang sangat terbuka untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam yang tersedia di wilayahnya sebagai upaya untuk dapat memajukan sektor pertanian dalam pembangunan daerahnya dan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Salah satu pengoptimalan sumber daya guna menunjang pembangunan wilayah kecamatan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi komoditi-komoditi

pertanian sehingga strategi pembangunan wilayah kecamatan di Kabupaten Lahat di sektor pertanian dapat diarahkan pada prioritas pengembangan komoditi pertanian basis yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan keseimbangan wilayah kecamatan. Penentuan prioritas pengembangan komoditi pertanian basis akan memudahkan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan wilayah kecamatan di Kabupaten Lahat sehingga akan mampu mempertahankan dan meningkatkan peranan sektor pertanian dalam perekonomian wilayah. Kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Lahat ditentukan oleh lima sub sektor pertanian, yaitu sub sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Masing-masing sub sektor tersebut menghasilkan berbagai macam komoditi yang dimiliki oleh Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat.

Potensi pertanian yang dimiliki di Kabupaten Lahat tidak terlepas dari potensi di tingkat wilayah utamanya kecamatan Kota Agung sehingga perlu adanya pengoptimalan sumber daya, dalam hal ini adalah komoditi-komoditi pertanian. Dengan mengenali potensi sektor pertanian ditinjau dari komoditi- komoditi yang dihasilkan, dapat diketahui komoditi-komoditi pertanian basis yang dapat diprioritaskan untuk dikembangkan sehingga pengembangan dalam sektor pertanian dan penetapan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Lahat dalam pembangunan wilayah kecamatan berbasis komoditi pertanian di masa mendatang dapat lebih terarah dan efisien.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dilakukan kajian guna mengetahui dan mengidentifikasi peranan sektor pertanian dalam perencanaan pembangunan ekonomi di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat.

KAJIAN TEORI

Pembangunan

Menurut Suryana (2000), keberhasilan suatu usaha pembangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari pengalaman pembangunan Negara-negara yang sekarang sudah maju, keberhasilan pembangunan pada dasarnya dipengaruhi oleh dua unsur pokok yaitu unsur ekonomi (sumber daya alam, sumber daya manusia, pembentukan modal dan teknologi) dan non ekonomik (politik, sosial, budaya dan kebiasaan).

Pada umumnya pembangunan itu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kearah yang lebih baik dan merata, sehingga dapat meningkatkan taraf

hidup dan kualitas hidup masyarakat yang bersangkutan dengan kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan yang relatif kecil. Akan tetapi kenyataannya berbicara lain dimana pemerataan dan kesenjangan tersebut berbeda-beda (Ropingi, 2002). Tiga tujuan pembangunan yang secara universal diterima sebagai prioritas dan mutlak untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar manusia di negara-negara sedang berkembang khususnya yaitu ketahanan pangan (*food security*), penghapusan kemiskinan atau peningkatan kualitas hidup manusia (*poverty eradication* atau *people livelihood improvement*), dan pembangunan desa berkelanjutan (*sustainable rural development*). Ketiga prioritas tujuan pembangunan tersebut saling berkaitan. Ketahanan pangan saling pengaruh mempengaruhi dengan kemiskinan maupun dengan membangun desa (Simatupang, 2004).

Pembangunan Ekonomi

Menurut Suryana (2000), beberapa ekonomi membedakan pengertian pembangunan ekonomi (*economic development*) dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dengan mengartikan istilah pembangunan ekonomi sebagai peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yaitu tingkat pertambahan GDP atau GNP pada suatu tahun tertentu adalah melebihi tingkat pertambahan penduduk, atau

Perkembangan GDP atau GNP yang terjadi dalam suatu Negara dibarengi oleh perombakan dan modernisasi struktur ekonominya (*transformasi struktural*). Usaha-usaha pembangunan yang sedang giat dilaksanakan oleh negara-negara sedang berkembang (*developing countries*) di dunia pada umumnya berorientasi kepada bagaimana memperbaiki atau mengangkat tingkat hidup (*level of living*) masyarakat di negara-negara tersebut agar mereka bisa hidup seperti masyarakat di negara-negara maju. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu jawaban yang seakan-akan menjadi semacam kunci keberhasilan suatu negara untuk meningkatkan taraf hidup warga negaranya (Suryana, 2000).

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Jadi tujuan pembangunan ekonomi di samping untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produksi. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tingkat output pada suatu saat tertentu ditentukan oleh tersedianya atau digunakannya baik

sumber daya alam maupun sumber daya manusia, tingkat teknologi, keadaan pasar dan kerangka kehidupan ekonomi atau sistem perekonomian serta sikap dari output itu sendiri (Simatupang, 2004).

Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal juga diarahkan untuk lebih mengembangkan dan menyesuaikan laju pertumbuhan antardaerah, antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan (Suyatno, 2000).

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Ropingi, 2002).

Proses pembangunan yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat dimulai dari aktivitas pemilihan komoditi dan jasa serta keahlian dan cara-cara produksi yang dimiliki oleh masyarakat setempat sebagai potensi untuk dikembangkan dan menjadi prime mover dari kegiatan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penciptaan nilai tambah mulai dari sisi bahan baku hingga sisi produknya. Pada gilirannya diharapkan bahwa penciptaan nilai tambah tersebut mampu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat (Simatupang, 2004).

Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut maka sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menangani potensi wilayah yang berada dalam ruang lingkup

pemerintahannya (Simatupang, 2004).

Pelaksanaan otonomi daerah menuntut tiap daerah agar bias melakukan optimalisasi semua sumber dayanya. Oleh karena itu, tiap daerah harus bisa cermat dalam memberdayakan potensi alam daerah setempat supaya lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Daerah memiliki keunggulan tertentu yang berbeda dengan daerah lain sehingga daerah perlu melakukan antisipasi dengan menentukan apa yang menjadi basis ekonomi dan kemungkinan bisa dikembangkan pada masa yang akan datang (Suyatno, 2000).

Otonomi daerah berarti memindahkan sebagian besar kewenangan yang tadinya berada di pemerintah pusat diserahkan kepada daerah otonom, sehingga pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Karena kewenangan membuat kebijakan (PERDA) sepenuhnya menjadi wewenang daerah otonom, maka dengan otonomi daerah pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan akan dapat berjalan lebih cepat dan lebih berkualitas. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah (PAD), sumber daya manusia yang dimiliki daerah, serta kemampuan daerah untuk mengembangkan segenap potensi yang ada di daerah otonom. Terpusatnya SDM berkualitas di kota-kota besar dapat didistribusikan ke daerah seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, karena kegiatan pembangunan akan bergeser dari pusat ke daerah (Ropingi, 2002).

Searah dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan berperan aktif dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di wilayah kerjanya. Partisipasi tersebut dengan memperhatikan beberapa azas berikut ini, mengembangkan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah sesuai dengan potensi sumber daya spesifik yang dimilikinya, serta disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat.

Menerapkan kebijakan yang terbuka dalam arti menselaraskan kebijakan ketahanan pangan nasional, mendorong terjadinya perdagangan antar daerah, mendorong terciptanya mekanisme pasar yang berkeadilan (Sudaryanto & Erizal, 2002).

Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian dapat diartikan sebagai proses yang ditujukan untuk

selalu menambah produk pertanian untuk tiap konsumen sekaligus mempertinggi pendapatan dan produktivitas usaha petani dengan jalan menambah modal dan skill untuk memperbesar campur tangan manusia di dalam perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Penambahan produksi, pendapatan maupun produktivitas ini berlangsung terus, sebab apabila tidak, berarti pembangunan terhenti (Sudaryanto & Erizal, 2002).

Pembangunan di sektor pertanian dalam arti luas akan terus di tingkat dengan tujuan meningkatkan produksi dan memantapkan swasembada pangan, meningkatkan pendapatan para petani, memperluas kesempatan kerja, memenuhi kebutuhan industri akan bahan baku dan untuk meningkatkan ekspor. Dalam rangka mendukung semakin terwujudnya keseimbangan antar industri dan pertanian dalam struktur ekonomi nasional, usaha pembangunan dan pengembangan sector industri, terutama agroindustri. Iklim usaha yang lebih mendorong partisipasi swasta dalam kegiatan pembangunan akan diusahakan melalui pemberian informasi dan kemudahan (Simatupang, 2004).

Pembangunan pertanian merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, karenanya visi dan misi pembangunan pertanian dirumuskan dalam kerangka dan mengacu pada pencapaian visi dan misi pembangunan nasional. Visi pembangunan pertanian adalah terwujudnya pertanian yang modern, tangguh dan efisien menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera. Misi pembangunan adalah menggerakkan berbagai upaya untuk memanfaatkan sumber daya pertanian secara optimal dan menerapkan teknologi tepat serta spesifik lokasi dalam rangka membangun pertanian yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan, dan, memberdayakan masyarakat pertanian menuju wiraswasta agribisnis yang mandiri, maju, dan sejahtera (Sudaryanto & Erizal, 2002).

Peran Sektor Pertanian dalam Pembangunan Ekonomi

Kedudukan sektor pertanian dalam tatanan perekonomian nasional kembali memegang peranan cukup penting. Pada sektor perekonomian lainnya mengalami penurunan akibat krisis ekonomi dan moneter yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Kondisi seperti ini memberikan kenyataan bahwa sektor pertanian masih merupakan bagian dari sumber daya pembangunan yang potensial untuk dijadikan sebagai sektor strategis perencanaan pembangunan nasional maupun perencanaan pembangunan ditingkat regional atau daerah saat ini dan kedepan, melalui program

pembangunan jangka pendek, menengah, maupun dalam program pembangunan jangka panjang (Suyatno, 2000).

Konsep dasar dari pentingnya pertanian sebagai sektor pemimpin di dalam pembangunan ekonomi dapat dilihat dalam pernyataan (Simatupang, 2004) sebagai berikut sektor andalan perekonomian adalah yang memiliki ketangguhan dan ketangguhan tinggi. Sektor andalan merupakan tulang punggung (*backbone*) dan mesin penggerak perekonomian (*engine of growth*) sehingga dapat pula disebut sebagai sektor kunci atau sektor pemimpin (*leading sector*) perekonomian nasional. Menurut mereka, ada lima syarat yang harus dilihat sebagai Kriteria dalam mengevaluasi pertanian sebagai sektor kunci dalam perekonomian nasional. Kelima syarat tersebut adalah strategis, tangguh, artikulatif, progresif, dan responsif.

Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi sangat penting karena sebagian besar anggota masyarakat di negara-negara miskin menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Jika para perencana dengan sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, maka satu-satunya cara adalah dengan meningkatkan kesejahteraan sebagian besar anggota masyarakatnya yang hidup di sektor pertanian (Suyatno, 2000).

Teori Ekonomi Basis

Teori basis ekspor (*export base theory*) adalah merupakan bentuk model pendapatan regional yang paling sederhana. Teori ini sebenarnya tidak dapat digolongkan sebagai bagian dari ekonomi makro inter-regional, karena teori ini menyederhanakan suatu sistem regional menjadi dua bagian, yakni daerah yang bersangkutan dan daerah-daerah selebihnya. Walaupun teori basis mengandung kelemahan-kelemahan. Namun sudah banyak studi empiris yang dilakukan dalam rangka usaha memisah-misahkan sektor-sektor basis dari sektor-sektor bukan basis suatu daerah. Analisa basis (*base analysis*) sesungguhnya adalah berkenaan dengan identifikasi pendapatan basis.

Teori ekonomi basis menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari suatu daerah. Proses produksi di sektor industri suatu daerah yang menggunakan sumber daya produksi lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku, dan outputnya

diekspor akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita, dan penciptaan peluang kerja di daerah tersebut (Suyatno, 2000).

Inti dari model basis ekonomi (*economic base model*) adalah bahwa arah dan pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah tersebut. Ekspor tersebut berupa barang-barang dan jasa, termasuk tenaga kerja, akan tetapi juga berupa pengeluaran orang asing yang berada di wilayah tersebut terhadap barang-barang tidak bergerak (*immobile*), seperti yang berhubungan dengan aspek geografi, iklim, peninggalan sejarah, atau daerah pariwisata. Sektor industri yang bersifat seperti ini disebut sektor basis. Untuk mengetahui apakah suatu sektor merupakan sektor basis atau non basis dapat digunakan beberapa metode, yaitu metode pengukuran langsung dan metode pengukuran tidak langsung.

Metode pengukuran langsung dapat dengan survei langsung untuk mengidentifikasi sektor mana yang merupakan sektor basis. Metode ini dapat menentukan sektor basis dengan tepat. Akan tetapi metode ini dapat memerlukan biaya, waktu dan tenaga kerja yang banyak. Mengingat hal tersebut di atas, maka sebagian besar pakar ekonomi wilayah menggunakan metode pengukuran tidak langsung.

Beberapa metode pengukuran tidak langsung yaitu, metode melalui pendekatan asumsi, Metode *Location Quotient*, Metode kombinasi (1) dan (2), dan Metode kebutuhan minimum (Suyatno, 2000). Teori ekonomi basis mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Dalam pengertian ekonomi regional, ekspor adalah menjual produk atau jasa ke luar wilayah baik ke wilayah lain dalam Negara itu maupun ke luar negeri. Kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan non basis. Kegiatan basis adalah kegiatan yang bersifat *exogenous* artinya tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya. Itulah sebabnya dikatakan basis. Sedangkan kegiatan non basis adalah kegiatan yang bersifat *endogenous* artinya pertumbuhannya tergantung kepada kondisi perekonomian wilayah secara keseluruhan sehingga kegiatan non basis sering disebut dengan pekerjaan (*service*) yaitu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri (Sudaryanto & Erizal, 2002).

Kelayakan Usaha Tani

Kelayakan adalah penelitian yang dilakukan untuk menentukan apakah usaha tani yang akan dijalankan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Dengan kata lain kelayakan dapat diartikan bahwa usaha yang dijalankan akan memberikan keuntungan finansial dan non finansial sesuai dengan tujuan yang mereka inginkan. Layak disini diartikan juga akan memberikan keuntungan tidak hanya bagi petani melainkan bagi daerah tersebut. Menurut Soeharto & Patong (1983), usaha tani adalah organisasi dari alam, tenaga kerja, dan modal serta pengelolaan atau manajemen yang bertujuan untuk memperoleh produksi dilapangan pertanian Usaha tani pada setiap daerah berbeda-beda sesuai dengan perbedaan alam, ekonomi dan sosial budaya yang terdapat pada daerah yang bersangkutan. Walaupun ada perbedaan usaha tani dari suatu daerah dengan daerah lainnya, namun secara umum masih digolongkan dalam usaha tani yang berpendapatan rendah, sehingga tingkat kesejahteraan hidup dari golongan masyarakat tani masih rendah.

Usaha tani sesungguhnya tidak sekedar hanya terbatas pada pengambilan hasil, melainkan benar- benar merupakan usaha produksi dimana berlangsung pendayagunaan tanah, investasi, tenaga kerja, manajemen dan faktor - faktor produksi lainnya.

Rendahnya pendapatan usaha tani id Indonesia, secara umum dipengaruhi oleh kecilnya penguasaan lahan usaha tani dan pemakai sarana produksi, belum tersedia teknologi pilihan yang tepat untuk dipakai oleh petani, dan masih kurangnya perangsang produksi bagi petani (Soekartawi, 2000).

Kecilnya lahan usaha tani menghambat usaha peningkatan produksi dan pendapatan petani. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Daniel (2002) bahwa tanah yang sempit merupakan kelemahan yang cukup besar bagi petani dengan kata lain, usaha tani pada tanah yang sempit kurang dapat memberikan keuntungan yang cukup bagi para petani dan keluarganya untuk hidup layak.

Pada usaha tani padi sawah, usaha meningkatkan produksi dikenal dengan pola intensifikasi. Intensifikasi yang dimaksud adalah peningkatan produksi sumber daya lahan melalui penggunaan teknologi dalam rangka meningkatkan pemanfaatan sarana produksi, meliputi pengaturan air irigasi, penggunaan bibit unggul, pupuk dan pestisida serta serta pengolakan tanah. Usaha peningkatan produksi usaha tani padi sawah sangat perlu dilakukan mengingat kebutuhan beras akan terus meningkat seiring.

Dilain pihak tantangan yang dihadapi yakni terjadinya perubahan fungsi lahan dari lahan pertanian dan non pertanian. Menurut Soekartawi, (2000) di Indonesia diperkirakan 105.000 Ha lahan setiap tahun berubah menjadi tempat mendirikan bangunan, baik perumahan, pabrik, jalan maupun bangunan lainnya. Sehingga permintaan padi pada masa datang akan sangat tergantung pada pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi suatu Negara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah obsevasi, wawancara, dan dokumentasi. sumber data yang diperlukan dalam penetiitan ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data yang terkumpul dari petani padi sawah sesuai jumlah sampel penelitian diedit serta ditabulasi menjadi satu kesatuan berdasarkan komponen-komponen yang akan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif adalah merupakan penjelasan atau uraian-uraian verbal. Sedangkan kuantitatif adalah pembahasan secara deskriptif dengan menggunakan rumus rasio keuangan sebagai berikut:

$$\text{Besarnya Pendapatan } (\eta) = TR - TC$$

Penjelasan dari persamaan di atas yaitu, a) simbol η adalah pendapatan bersih usaha tani padi sawah; b) TR adalah total penerimaan usaha tani padi sawah; c) TC adalah total biaya usaha tani padi sawah. Rumus tersebut digunakan mengetahui besarnya tingkat pendapatan usahatani pada sawah dalam berusaha tani. Rumus berikut adalah rentabilitas Ekonomi digunakan untuk mengetahui efisiensi penggunaan modal atau untuk mengukur keuntungan usaha tani dalam kaitannya dengan investasi yang digunakan.

$$\text{Rentabilitas Ekonomi} = \frac{\text{Laba Usaha}}{\text{Modal Produksi}} \times 100\%$$

Jika ratio ini mempunyai nilai rendah, berarti pelaksanaan agribisnis belum efisien.

HASIL PENELITIAN

Pendidikan

Pendidikan seseorang erat kaitannya dengan cara berfikir dan sangat mempengaruhi kemampuan serta keterampilan petani dalam mengelolah usaha taninya. Semakin tinggi pendidikan yang di miliki petani maka akan lebih muda menerima adopsi teknologi baru yang berkaitan dengan usaha taninya. Dalam penelitian ini yang menjadi responden yaitu petani padi sawah, bila di tinjau dari tingkat pendidikan maka sebagian besar responden hanya berpendidikan sekolah dasar (SD), kemudian di susul oleh yang berpendidikan SLTP dan SLTA. Untuk lebih jelasnya, tingkat pendidikan responden dapat di lihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1.
Tingkat Pendidikan Responden Petani Padi Sawah di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah petani	(%)
1.	SD	7	46.67
2.	SLTP/Sederajat	6	40.00
3.	SLTA/Sederajat	2	13.33
	JUMLAH	15	100

Berdasarkan Data pada tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penilitian ini berpendidikan sekolah dasar (SD) yaiu sebanyak 7 petani atau sebesar 46,67% kemudian yang berpendidikan SLTP/Sederajat sebanyak 6 petani atau sebesar 40,00% dan yang berpendidikan SLTA/Sederajat sebanyak 2 petani atau sebesar 13,33%.

Luas Lahan

Lahan yang di usahakan merupakan faktor utama yang mempengaruhi produksi dalam setiap usaha tani, sekaligus merupakan bagian yang terpenting dari semuakegiatan usaha tani. Semakin luas lahan yang di usahakan akan semakin tinggi pula produksi fisik yang di peroleh. Untuk lebih jelasnya, luas lahan dapat lihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2.
Luas Lahan yang di Usahakan Responden Petani padi Sawah Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat Tahun 2019

No	Luas lahan	Jumlah Petani	(%)
1.	> 0-1	11	73,33

2.	> 1-2	4	26,67
3.	> 2-3	0	0,00
Jumlah		15	100

Pada tabel 2 dapat di kemukakan bahwa luas lahan yang di usahakan oleh petani yang di jadikan responden untuk usaha tani sebesar dari 0 Ha sampai dengan 1 Ha sebanyak 11 petani atau sebesar 73,33% dan untuk petani atau sebesar 60,00% dan produksi beras besar dari 1.452 kg sampai dengan 2.178 kg sebanyak 4 petani atau sebesar 26,67%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa total produksi beras dengan luas dengan luas lahan panen adalah 16,90 Ha adalah sebesar 18.4004,10 kg dan bila di rata-ratakan per hektarnya adalah sebesar 1.089 kg. Hal ini berarti bahwa setiap satu kali panen petani padi sawah maka akan memperoleh produksi dalam bentuk beras rata-rata adalah 1.089 kg untuk tiap hektarnya.

Produksi

Produksi adalah proses penggunaan faktor-faktor produksi dengan maksud untuk menciptakan faedah untuk memenuhi kebutuhan. Pengertian tersebut memberikan penekanan bahwa produksi merupakan proses, yakni bagaimana mengkombinasikan berbagai unsur produksi untuk menciptakan faedah dalam memenuhi kebutuhan. Mengenai hasil produksi yang di hasilkan oleh petani padi sawah sekali panen dapat di jelaskan pada tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3.
Produksi Beras yang di Hasilkan pada Saat Panen oleh Petani Padi Sawah di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat Tahun 2019

No	Produksi Beras (kg)	Jumlah Petani	(%)
1.	> 0-726	2	13.33
2.	> 726-1.452	9	60.00
3.	> 1.452-2.178	4	26.67
Jumlah		15	100

Pada tabel 3 dapat di kemukakan bahwa produksi beras besar dari 0 kg sampai dengan 726 kg sebanyak 2 petani atau sebesar 13.33%, untuk produksi beras besar dari 726 kg sampai dengan 1.452 kg sebanyak 9 petani atau sebesar 60,100% dan produksi beras besar dari 1.452 kg sampai dengan 2.178 kg sebanyak 4 petani atau sebesar 26,67%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total produksi beras dengan luas lahan

panen adalah 16,90 Ha adalah sebesar 18.404,10 kg dan bila di rata-ratakan per hektarnya adalah sebesar 1.089 kg untuk tiap hektarnya.

Penerimaan

Penerimaan adalah perkalian antara produksi yang di peroleh dengan harga jual. Mengenai penerimaan yang di peroleh oleh petani padi sawah sekali panen dapat dijelaskan pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4.
Penerimaan yang Dihasilkan pada Saat Panen oleh Petani Padi Sawah di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat 2019

No	Total Penerimaan (RP)	Jumlah petani	(%)
1	> 0-4.719.000	2	13,33
2	> 4.719.000 - 9.438.000	10	66,67
3	> 9.438.000 - 14.157.000	3	20,00
	Jumlah	15	100

Pada tabel 4 dapat di kemukakan bahwa total penerimaan besar dari RP.0 sampai dengan Rp.4.719.000 sebanyak 2 petani atausebesar13,33%,untuk total penerimaan besar dari Rp. 4.719.000 sampai dengan petani atau sebesar 26,67% sedangkan luas lahan besar dari 2 Ha sampai dengan Rp. 9.438.000 sebanyak 10 petani atau sebesar 66,67% dan total penerimaan besar dari Rp. 9.438.000 sampai dengan Rp. 14.157.000 sebanyak 3 petani atau sebesar 20,00%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa total penerimaan adalah sebesar Rp. 108.246.600,00 dengan luas lahan adalah 16,90 Ha dan bila dirata-ratakan per hektarnya adalah sebesar Rp. 6.405.124,26. Hal ini berarti bahwa setiap satu kali panen petani padi sawah akan memperoleh penerimaan rata-rata sebesar Rp. 6.405.124,26 untuk tiap hektarnya.

Biaya

Biaya usaha tani padi sawah diklasifikasikan dalam dua jenis pembiayaan yakni biaya Variabel dan Biaya tetap, dalam hubungan dengan biaya usaha tani maka total biaya (total cost) adalah penjumlahan antara biaya tetap (fixed cost) dengan biaya tetap (variabel cost) yang mana di klasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu, a) biaya tetap (*fixed cost*) usaha tani adalah biaya yang relatif tetap jumlahnya, dan tidak tergantung pada produksi yang di dihasilkan. Misalnya pajak tanah dan sewa lahan serta biaya

penyusutan alat; b) biaya tidak tetap (*variabel cost*) usaha tani adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi produksi yang dihasilkan, misalnya penggunaan saprodik dan tenaga kerja. Mengenai total biaya yang di keluarkan oleh petani padi sekali panen di jelaskan pada tabel 5 dibawah ini:

Tabel 5.
Total Biaya yang Dikeluarkan oleh Petani Padi Sawah di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat 2019

No	Total Penerimaan (RP)	Jumlah Petani	(%)
1	> 0 - 2.379.000	2	13.33
2	> 2.379.000 - 4.758.000	9	60.00
3	> 4.758.000 – 7.137.000	4	26.67
	Jumlah	15	100

Pada tabel 5 dapat di kemukakan bahwa, total biaya besar dari Rp. 0 sampai dengan Rp2.379.000 sebanyak 2 petani atau sebesar 13.33% untuk total biaya besar dari Rp2.379.000 sampai dengan Rp4.758.000 sebanyak 9 petani atau sebesar 60,00% dan total biaya besar dari Rp4.758.000 sampai dengan Rp7.137.000 sebanyak 4 petani atau sebesar 26,67%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total biaya adalah sebesar Rp50.261.650 dengan luas lahan adalah 16,90 Ha dan bila dirata-ratakan perhektarnya adalah sebesar Rp2.974.062,13. Hal ini berarti bahwa setiap satu kali panen, petani padi sawah akan mengeluarkan biaya rata-rata sebesar Rp2,974,062,13 untuk tiap hektarnya.

Pendapatan

Pendapatan usaha tani di definisikan sebagai selisih antara total penerimaan yang diperoleh dengan total biaya produksi yang telah dikeluarkan. Jika diselisih tersebut positif. Maka usaha tani tersebut memperoleh keuntungan. Sedangkan jika selisih tersebut negatif. Maka usaha tani tersebut mengalami kerugian. Dan jika selisih tersebut nol (total biaya sama dengan total penerimaan) maka usaha tani tersebut tidak memperoleh keuntungan maupun tidak mengalami kerugian. Yang di sebut keadaan titik potong. Hasil analisa data tentang perhitungan pendapatan usaha tani akan diberikan pada tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 6.
Hasil Analisis Usaha Tani Padi Sawah (Per Ha per MT) oleh Petani Padi Sawah di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat Tahun 2019

No.	Uraian		Nilai (Rp/Ha/MT)
1.	Produksi Beras	1.089 kg/ha/MT Rp. 5.881,6568 /kg	6.405.1 24,26
2.	Harga Beras Rata-rata		
3.	Total Penerimaan (1x2)		
4.	Biaya Produksi :	100.000,00	
	a. Biaya tetap :	600.000,00	
	- Pajak lahan (i)	86.246,56 +	
	- Sewa lahan (ii)		
	- Penyusutan Alat (iii)		1.486.246,56
	Jumlah biaya tetap (i+ii+iii)		
	b. Biaya Variabel :	123.248,52	
	- Benih (i)	326.568,05	
	- Pupuk (ii)	90.000,00	
	- Pestisida (iii)	2.150.000,00 +	
	- Tenaga Kerja (iv)		2.644.816,57 +
	Jumlah biaya variabel (i+ii+iii+iv)		
	Total Biaya (4a+4b)		3.431.0
			62,13 _
5.	Pendapatan usaha tani (3-4)		2.974.0 62,13
6.	Rata-rata Biaya Varibel (AVC) : Yaitu total biaya variabel di bagi total produksi beras/kg/MT (4b/1)	Rp.2.428,67	kg/ha/MT

Sumber : Data Diolah, 2020

PEMBAHASAN

Hasil Analisis Usaha Tani Padi Sawah (Per Ha per MT) oleh Petani Padi Sawah di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat Tahun 2019

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 6, dapat di lihat baha dengan total biaya produksi Rata- rata sebesar Rp.3.431.062,13 /Ha/MT yang terdiri atas biaya tetap sebesar Rp. 1.486.246,56/Ha/MT dan biaya variabel sebesar Rp.2.644.816,57/Ha/MT.

Maka di peroleh hasil produksi beras rata-rata Rp.5.881.65,68/kg sehingga di peroleh total penerimaan rata-rata sebesar Rp6.405.124,26/Ha/MT. Maka pendapatan rata rata usaha tani yang di peroleh sebesar Rp2.974.062,13/Ha/MT. Total rata-rata pendapatan yang di peroleh petani padi sawah per periode produksi (4 bulan) sebesar Rp.2.974.062.13 per hektar, maka besar pendapatan petani padi sawah setiap bulanya adalah sebesar Rp.743.515,53. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan petani pada Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat di atas upah minimum provinsi (UMP) di Kabupaten Lahat yakni sebesar RP.655.000,00 per bulan. Sehingga bila di presentasikan maka tingkat pendapatan petani padi sawah mencapai 113,51% dari upah minimum profinsi (UMP) sehingga layak untuk tetap di usahakan.

Analisis Rentabilitas Ekonomi atau Return on Assed (ROA)

Rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba usaha tani dengan modal sendiri dan modal asing yang di gunakan untuk menghasilkan laba dan di nyatakan presentase (Riyanto, 2001). Rentabilitas ekonomi digunakan untuk mengetahui efisiensi penggunaan modal atau untuk mengukur keuntungan usaha tani dalam kaitannya dengan infestasi yang digunakan (Sampoerna University, 2022). Mengenai hasil perhitungan rentabilitas ekonomi atau returnon assed Lahat sekali panen menunjukkan bahwa rata-rata sebesar 75,80% untuk tiap hektarnya, artinya setiap modal produksi rata-rata sebesar Rp.100,00 yang di gunakan oleh petani padi sawah,maka akan mandapatkan keuntungan rata-rata sebesar Rp.75,80 untuk tiap hektarnya sekali panen .

SIMPULAN

Simpulan pada penelitian ini adalah, a) tingkat pendapatan petani padi di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat di atas belum layak berdasarkan upah minimum provinsi (UMP) di Kabupaten Lahat; b) kemampuan petani padi sawah Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat untuk mendapatkan keuntungan usaha tani melalui semua kemampuan dan sumber yang ada, menunjukkan keadaan yang sangat baik sehingga hasil usaha tani yang dihasilkan dapat layak sesuai dengan keinginan para petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Daniel, G. (2000). *Emotional Intelligence (Kecerdasan Emosional)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum
- Riyanto, B. (2001). *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE
- Ropingi, R. (2002). *Identifikasi Komponen Pertumbuhan Sektor Pertanian*. Surakarta: Pradya Paramitha
- Samporna University. (2022). *Rasio Rentabilitas: Arti, Jenis, Manfaat, & Cara Menghitung*. <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/rasio-rentabilitas-arti-jenis-manfaat-dan-cara-menghitung/>
- Simatupang, L. R. (2004). *Asas-asas Penelitian Behavioral*, (3rd ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Soeharto, S., & Patong, D. (1983). *Sendi-Sendi Pokok Ilmu Usaha Tani*. Makasar: Universitas Hasanudin
- Soekartawi, S. (2000). *Pengantar Agroindustri*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sudaryanto, T., & Erizal, J. (2002). *Intensifikasi Pertanian*. Jakarta: Swadaya
- Suryana, S. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Problematikan dan Pendekatan*, (1st ed.). Jakarta: Salemba Empat
- Suyatno, S. (2000). *Analisis Ekonomi Basis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Jakarta: Gramedia